

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAERAH

2023

I. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan 6 dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut :

Dimensi 1 : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 2 : Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi 3 : Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi 4 : Penyerapan anggaran

Dimensi 5 : Kondisi keuangan daerah

Dimensi 6 : Opini BPK

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut :

TOTAL INDEKS IPKD = Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 + Dimensi 4 + Dimensi 5 + Dimensi 6

atau

TOTAL INDEKS IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6

Dimana :

1. D.1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. D.2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
3. D.3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. D.4 = Penyerapan anggaran
5. D.5 = Kondisi keuangan daerah
6. D.6 = Opini BPK

I. Indeks Dimensi 1 = Skor rata-rata x bobot

Dimana :

1. D.1.1 = Kesesuain nomenklatur program RPJMD dan RKPD, memperoleh hasil pengukuran = 0.816
2. D.1.2 = Kesesuain nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.846
3. D.1.3 = Kesesuain nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.854
4. D.1.4 = Kesesuain pagu program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.040
5. D.1.5 = Kesesuain pagu program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.014
6. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.1 = Skor rata-rata x bobot

$$D.1 = \frac{D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 + D.1.4 + D.1.5}{5} \times 15$$

$$D.1 = \frac{0.816 + 0.846 + 0.854 + 0.040 + 0.014}{5} \times 15$$

$$D.1 = 7.7075$$

II. Indeks Dimensi 2 = Skor rata-rata x bobot

Dimana :

1. D.2.1 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan, memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.2.2 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan, memperoleh hasil pengukuran = 1
3. D.2.3 = Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
4. D.2.4 = Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, memperoleh hasil pengukuran = 0.9655
5. Bobot = 20

Jadi : Indeks D.2 = Skor rata-rata x bobot

$$D.2 = \frac{D.2.1 + D.2.2 + D.2.3 + D.2.4 + D.2.5}{4} \times 20$$

$$D.2 = \frac{1 + 1 + 1 + 0,9655}{4} \times 20$$

$$D.2 = 19.8276$$

III. Indeks Dimensi 3 = Skor rata-rata x bobot

Dimana :

1. D.3.1 = Ketepatan waktu, memperoleh hasil pengukuran = 25
2. D.3.2 = ketersediaan/keteraksesan, memperoleh hasil pengukuran = 28
3. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot

$$D.3 = \frac{D.3.1 / 29 + D.3.2 / 29}{2} \times 15$$

$$D.3 = \frac{25/29 + 28/29}{2} \times 15$$

$$D.3 = 13.7069$$

IV. Indeks Dimensi 4 = Skor rata-rata x bobot

Dimana :

1. D.4.1 = Penyerapan anggaran belanja operasional, memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.4.2 = Penyerapan anggaran belanja modal, memperoleh hasil pengukuran = 1

3. D.4.3 = Penyerapan anggaran belanja tidak terduga, memperoleh hasil pengukuran = 0
4. D.4.4 = Penyerapan anggaran belanja transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
5. Bobot = 20

Jadi : Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot

$$D.4 = \frac{D.4.1 + D.4.2 + D.4.3 + D.4.4}{4} \times 20$$

$$D.4 = \frac{1 + 1 + 0 + 1}{4} \times 20$$

$$D.4 = 15$$

V. Indeks Dimensi 5 = Hasil diukur berdasarkan 6 indikator kondisi keuangan daerah mulai dari kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

Jadi Indeks D.5 = 1.8696

VI. Indeks Dimensi 6 = skor OPINI BPK x bobot

Nilai :

1. WTP = 1
2. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.6 = skor opini BPK x bobot

$$D.6 = 1 \times 15$$

$$D.6 = 15$$

$$\begin{aligned}
 \text{TOTAL INDEKS IPKD} &= \text{D.1} + \text{D.2} + \text{D.3} + \text{D.4} + \text{D.5} + \text{D.6} \\
 &= 7.7075 + 19.8276 + 13.7069 + 15 + 1.8696 + 15 \\
 &= 73.1115 \\
 &= \text{PERLU PERBAIKAN (B)}
 \end{aligned}$$

Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu :

1. Kategori A : Baik
2. Kategori B : Perlu Perbaikan
3. Kategori C : Sangat Perlu Perbaikan

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	Tercapai

Sumber : IPKD Kemendagri/2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 tercapai, dimana pada tahun 2023 target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai B dan terealisasi nilai B dengan capaian kinerja TERCAPAI.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel 1.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	Target	% capaian
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	A	BELUM TERCAPAI

Sumber : IPKD Kemendagri/2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan nilai yang memuaskan yaitu nilai B, berarti dapat mempertahankan nilai sama dengan tahun sebelumnya serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target RPJMD (tahun 2026) yaitu nilai A maka capaian kinerja BELUM TERCAPAI.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT.

Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dengan Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B

Sumber : IPKD Kemendagri/2023

Dari tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperoleh oleh Propinsi Sumatera Barat bernilai B dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Solok bernilai B.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA.

Tercapainya target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2023 disebabkan oleh :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, didukung dengan :
 - a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
 - b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
 - d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, didukung dengan :
 - a. Mengalokasikan belanja fungsi pendidikan 36,12 % dari APBD.
 - b. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan 12,96 % dari APBD.
 - c. Mengalokasikan jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer 34 % dari dana transfer umum.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung dengan :
 - a. Dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem informasi pemerintahan.

- b. Dokumen pengelolaan keuangan daerah telah diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
4. Penyerapan Anggaran, didukung dengan :
- Data penyerapan anggaran diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran dalam APBD sesuai PP No. 12 Tahun 2019, meliputi penyerapan :
- Anggaran belanja operasional
 - Anggaran belanja modal
 - Anggaran belanja tidak terduga
 - Anggaran belanja transfer
5. Kondisi Keuangan Daerah, didukung dengan :
- a. Kemandirian keuangan
 - b. Fleksibilitas keuangan
 - c. Solvabilitas operasional
 - d. Solvabilitas jangka pendek
 - e. Solvabilitas jangka panjang
 - f. Solvabilitas layanan
6. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan, didukung dengan keberhasilan perolehan Opini WTP lebih dari 6 tahun terakhir secara berturut-turut.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan cara :
 - a. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
 - b. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.

- d. Memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - e. Memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
2. Untuk lebih mengupayakan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, dengan cara :
- a. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20 % dari APBD.
 - b. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10 % dari APBD.
 - c. Mengalokasikan jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 25 % dari dana transfer umum.
 - d. Mengalokasikan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Untuk mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan cara :
- a. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
 - b. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
4. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran.
5. Mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Mempertahankan kualitas opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan dengan cara menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

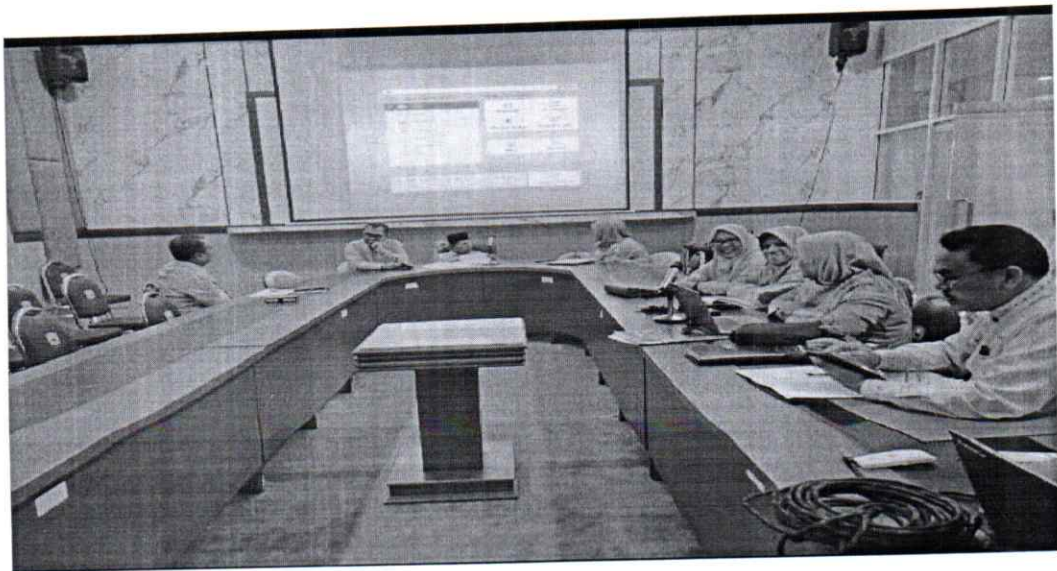
IKU	KINERJA			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.999.537.244,00	3.999.537.244,00	84.74
Rata-rata capaian				Total Anggaran	3.999.537.244,00	3.999.537.244,00	84.74
Tingkat Efisiensi	84.74						
Tingkat Efektivitas	EFEKTIF						

Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2023 Badan Keuangan Daerah didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah dan didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu serta sarana dan prasarana yang ada.

Untuk sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah didukung oleh ASN dan THL yaitu Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 6 orang ASN dan 5 orang THL, Bidang Akuntansi dan Pelaporan 7 orang ASN dan 5 orang THL serta Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah 8 orang ASN dan 8 orang THL. Untuk sarana dan prasarana didukung oleh kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Untuk mencapai kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini persentase anggaran yang digunakan sebesar 84,74%.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :



Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Solok adalah:

Tabel .1.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.999.537.244,00	3.389.208.244,00	84.74
I	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	2.418.972.220,00	2.054.097.520,00	84.92
III	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	1.580.565.024,00	1.335.110.724,00	84.47

II. OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian target Opini BPK pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 16.1

OPINI BPK

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	WTP	WTP	TERCAPAI

Sumber :Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan tabel 16.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 TERCAPAI, dimana pada tahun 2023 target Opini BPK dengan Opini WTP dan terealisasi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja TERCAPAI.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel 16.2
Perkembangan Opini BPK

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	% Capaian
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	TERCAPAI

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan tabel 16.2 dapat dilihat bahwa realisasi Opini BPK pada beberapa tahun terakhir mencapai hasil yang sangat memuaskan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka capaian kinerja TERCAPAI.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT.

Perbandingan Opini BPK Kabupaten Solok tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 16.3 di bawah ini :

Tabel 16.3
Perbandingan Opini BPK

No	Indikator Kinerja	Propinsi	Kabupaten Solok
1.	Opini BPK	WTP	WTP

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Dari tabel 16.3 dapat dilihat bahwa Opini BPK Kabupaten Solok tahun 2023 sama dengan perolehan yang diterima oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yaitu WTP.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKANDAN RENCANATINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Tercapainya target Opini BPK Kabupaten Solok tahun 2023 disebabkan oleh :

- a. Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dihimpun dari 40 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023 yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang didukung dengan :
 - Pemanfaat Sistim Informasi Keuangan Daerah sehingga Penyusunan Laporan Keuangan Daerah OPD sudah sistimatis.
 - Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD oleh Badan Keuangan Daerah.
- b. Laporan Keuangan OPD tepat waktu didukung oleh 40 OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan OPD Tahun 2023 yang tepat waktu, selanjutnya di konsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan cara rekonsiliasi data laporan keuangan secara berkala yang terdiri atas data keuangan dan aset.
- c. Penyusunan APBD Tahun 2023 telah sesuai dengan Jadwal dan Proses Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor :
 1. Keputusan DPRD Kab. Solok Nomor : 100.3-21-2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 menjadi Peraturan Daerah dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten Solok tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Tanggal 21 September 2023.

2. Adanya rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan setiap semester.
3. Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas temuan barang milik daerah, telah dilaksanakan koordinasi dengan OPD dan Instansi Vertikal.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan Opini BPK Kabupaten Solok adalah :

1. Mempertahankan kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Konsisten terhadap efektivitas system pengendalian intern.
4. Akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari pemeriksa.
5. Menyampaikan Laporan Keuangan dengan lebih cepat.

E. ANALISA ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

IKU	KINERJA			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Opini BPK	WTP	WTP		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.208.168.462,00	1.060.287.559,00	87.76
Rata-rata capaian				Total Anggaran	1.208.168.462,00	1.060.287.559,00	87.76
Tingkat Efisiensi	87.76						
Tingkat Efektivitas	EFEKTIF						

Pada Indikator Opini BPK di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 87.76% dan tingkat efektifitasnya EFEKTIF dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.208.168.462,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.060.287.559,00.

Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Opini BPK di dukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Badan Keuangan Daerah dan seluruh OPD di Kabupaten Solok.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja indikator Opini BPK terdapat program dan Kegiatan sebagai berikut :





Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Opini BPK di Kabupaten Solok adalah:

Tabel16.4
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.208.168.462,00	1.060.287.559,00	87.76
II	Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1.208.168.462,00	1.060.287.559,00	87.76
B	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.296.896.297,00	1.077.530.125,00	83.09
IV	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	1.296.896.297,00	1.077.530.125,00	83.09

Arosuka, Februari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY, SE.M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006